KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BERBASIS GREEN ECONOMY



Faizal Kurniawan
Mas Rahmah
Angelica Milano Aryani Wibisono
Bryan Owen Soeprapto

KERJA SAMA
PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BERBASIS GREEN ECONOMY

Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BERBASIS GREEN ECONOMY

Faizal Kurniawan
Mas Rahmah
Angelica Milano Aryani Wibisono
Bryan Owen Soeprapto

Airlangga University Press

KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BERBASIS *GREEN ECONOMY*

Faizal Kurniawan ... [dkk]

ISBN 978-634-7123-05-3 (PDF))

© 2024 Penerbit **Airlangga University Press**

Anggota IKAPI dan APPTI Jawa Timur
Kampus C Unair, Mulyorejo Surabaya 60115
Telp. (031) 5992246, 5992247
E-mail: adm@aup.unair.ac.id

Redaktur (Sarah Khairunnisa)
Layout (Bagus Firmansah)
Cover (Ahmad Syarifudin Firdaus)
AUP (1500/12.24)

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip dan/atau memperbanyak tanpa izin tertulis
dari Penerbit sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apa pun.

Prakata

Puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya, sehingga Para Penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul: "*KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BERBASIS GREEN ECONOMY*". Buku ini para penulis tulis, karena melihat adanya hal yang seolah-olah merupakan dikotomi di Indonesia, yaitu **pembangunan infrastruktur** dan **kelestarian lingkungan**.

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, berkualitas, dan berkesinambungan merupakan hal yang esensial bagi Indonesia. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, kualitas hidup, membangun konektivitas antara wilayah, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur adalah hal yang esensial di Indonesia.

Kelestarian lingkungan merupakan hal yang penting di Indonesia, karena lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional bagi setiap Warga Negara Indonesia, sebagaimana Pasal 28H UUD NRI 1945. Kualitas lingkungan hidup yang baik, tentu akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk

hidup yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, dapat dikatakan dengan menjaga kelestarian lingkungan, maka termasuk melindungi ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia. Oleh sebab itu, kelestarian lingkungan adalah hal yang esensial pula di Indonesia.

Pada realitanya, sering kali pembangunan yang dilakukan di Indonesia menyebabkan kerusakan pada kelestarian lingkungan yang ada. Seolah-olah dengan melakukan pembangunan pasti akan membuat lingkungan menjadi rusak. Sebaliknya, ketika tindakan-tindakan yang bertujuan menjaga kelestarian lingkungan seolah-olah antipati terhadap pembangunan infrastruktur yang ada.

Atas dasar permasalahan tersebut di atas, maka Para Penulis berpandangan, bahwa adanya buku ini dapat menjadi solusi konkret terhadap permasalahan pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan yang seolah-olah merupakan paradoks, justru dapat menjadi beriringan satu sama lain. Hadirnya buku ini menghadirkan solusi konkret, yaitu Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) sebagai tonggak pembangunan, tetapi tetap dengan berlandaskan *green economy*, sehingga akan tercipta infrastruktur berkelanjutan yang notabene merupakan manifestasi dari pembangunan infrastruktur dan kelestarian lingkungan.

Akhir kata, Para Penulis mengutip salah satu prinsip klasik di dalam hukum kodrat (*lex naturalis*): "*bonum est faciendum et prosequendum malum evitandum*" yang jika diterjemahkan secara bebas: "kebaikan harus dilakukan, keburukan harus dihindari". Para Penulis berharap ide-ide yang tertuang di dalam buku ini dapat menjadi hal baik yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, setidak-tidaknya bagi para pembaca buku ini.

Surabaya, 29 Agustus 2024
Para Penulis

Kata Pengantar

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam kehidupan bernegara. Infrastruktur yang baik tidak hanya membuka akses yang lebih luas terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi, tetapi juga menjadi katalisator bagi penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing ekonomi. Melalui Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), tantangan dalam pembangunan infrastruktur dapat dihadapi bersama dengan memadukan sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam menggunakan sumber daya dan keahlian dalam percepatan penyediaan infrastruktur yang berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. KPBU, bukan hanya sebuah strategi pembangunan dan pendanaannya, melainkan sebuah jalan menuju masa depan yang lebih cerah dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

Di sisi lain, lingkungan yang sehat adalah aset berharga bagi kehidupan dan kesejahteraan manusia. Kelestarian alam tidak hanya penting untuk keberlangsungan ekosistem, tetapi juga menjadi penentu kualitas hidup dan stabilitas ekonomi suatu bangsa. Dalam era modern ini, konsep *Green Economy* muncul sebagai jawaban atas tantangan global yang mendesak, mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi

dengan keberlanjutan lingkungan. *Green Economy* menekankan pada penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan emisi karbon, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Infrastruktur yang dibangun dengan prinsip-prinsip Green Economy memainkan peran kunci dalam menciptakan sistem yang berkelanjutan dan *resilient*, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak mengorbankan masa depan.

Buku ini menawarkan wawasan yang sangat penting dan relevan bagi kita semua. Para penulis dengan bernas memadupadankan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema KPBU dengan kepentingan keberlanjutan lingkungan. Dalam konteks *Green Economy*, KPBU menjadi alat yang sangat efektif untuk mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi mendatang.

Saat ini, referensi mengenai KPBU di Indonesia masih sangat terbatas, apalagi KPBU berbasis *Green Economy*. Buku ini mengisi kurangnya literatur dan memberikan panduan yang komprehensif bagi kita semua. Penghargaan yang tinggi diberikan kepada para penulis, yang dengan dedikasi dan ketekunan telah menyusun buku ini serta komitmen tinggi dalam mendorong perubahan positif melalui pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan berorientasi pada masa depan. Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Reghi Perdana, S.H., LL.M.

Pendiri dan Pengawas Perkumpulan Ahli
Profesional KPBU Indonesia

Kata Pengantar

SEBUAH PENGANTAR:
Buku Ini Seberkas Peneguhan *Green Economy*

BUKU ini hadir dengan segala ketepatannya. Memiliki kelayakan waktu karena datang di momentum yang mewarnai diskursus global *green vision* sekaligus pemaknaan atas nilai-nilai kolaboratif yang aktual. Pemerintah dalam sendi terminologi *government* maupun *governance* sama-sama berkelindan menjangkau *stakeholders* yang dibingkai *stateholders.* Kerja sama adalah simpul kecenderungan yang berdimensi lokal sampai mondial. Tidak ada entitas ekologis maupun yuridis yang dapat *full survival* tanpa dibarengi adanya kerelaan ataupun perkenan untuk bermitra. Kemitraan adalah keniscayaan untuk menjadi maujud dalam perspektif tertib hukum. Aktivitas pemerintahan dan keusahaan musti dibalut dengan skema hukum kerja sama agar memiliki substrat legal. Dengan legalitas itulah tertib pemerintahan dan tertib keusahaan menjadi terjaga. Ketunggalan arti Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dirumuskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bukan sekadar istilah, melainkan adonan yang menopang seluruh aktivitas pemerintahan yang berbalutan norma hukum sehingga berkepastian hukum. Untuk itulah hukum berposisi menjadi pijakan fundamental yang menentukan arah keabsahan sebuah relasi: termasuk relasi kerja sama dengan *legal body* apapaun nan manapun.

Dalam konfigurasi pemikiran itulah saya menyambut hadirnya buku *Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Berbasis Green Economy sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan.* Buku yang menguatkan visi besar pembangunan berkelanjutan *(sustainable development)* yang dikukuhi masyarakat internasional. Mulai dari desa sampai komunitas dunia telah terpanggil untuk menjadikan isu lingkungan sebagai arah baru pembangunan ke depan, meski sudah digaungkan pada paruh kedua abad ke-20. Komitmen politik yang berorientasi ekologis secara internasional telah disorongkan sejak 5 Juni 1972 dalam *United Nations Conference on The Human Environment*, di Stockholm, Swedia.

Untuk itulah, setiap jejak langkah pemerintahan harus dikanalisasi dalam visi integrasi kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan yang dikembangkan pada koridor *green investment* setarikan nafas *green economy.* Khalayak ramai menyaksikan betapa dahsyat krisis ekologis yang terbentang di seluruh titik geografis Bumi saat ini. Mengoreksi investasi yang abai konservasi pun sudah lama digalang komunitias dunia dan disodorkan konsepsi pembangunan yang memiliki bobot pertimbangan lingkungan *(green policy)* sebagai kriteria utama. Hal ini didasarkan pada konsekuensi pembangunan infrastruktur yang tidak ramah lingkungan ternyata secara tematik menghasilkan korban aksiomatik pembangunan. Pembangunan atas nama kemajuan terbukti menggerus peradaban pada tingkat yang mencemaskan. Saya teringat perkataan cerdas Khalid Fazlun dari *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Science,* England, UK, bahwa *progess* (kemajuan) telah menghasilkan *pollution* (pencemaran) dan pembangunan *(development)* identik dengan kerusakan *(destruction).* Hal ini berarti: P *(Prograss)* + P *(Development)* = P *(Pollution)* + D *(Destruction).* Inilah tragedi kolektif pembangunan yang harus diantisipasi dalam mencari investor. Jangan sampai kondisi lingkungan rakyat terkoyak oleh para investor, yang secara praksis dapat berubah perilaku sebagai predator.

Siapapun yang peduli dengan pembangunan keberlanjutan *(sustainable development)*, penting menyimak pemikiran Alex Wilson cs melalui pendulum *green development* yang secara aplikatif untuk mengkonstruksi *green city*. Simaklah dengan cermat dan mawas diri apa yang sedang berputar dalam rumpun sejarah peradaban perkotaan dunia. Modernisasi mengubah hutan menjadi desa, dan desa bergerak menuju kota yang memuai menghasilkan kota-kota yang disebut *metropolitan.* Kota ini terus mengembang infrastrukturnya menuju *ecumenopolitan* yang berujung cerita sebagai *nekropolitan* alias kota kematian. Mengikuti guyonan Eko Budihardjo, bukankah Chicago telah dilecehkan dengan sebutan *"sickago"* dan Frankfurt dijuluki *"krankfurt"* alias kota yang sakit. Indianapolis diledek *"india-no-place"* karena tidak adanya *sense of place.* Ini adalah sebuah parodi kenaifan yang melanda banyak negara.

Pasal 28 huruf H UUD 1945 mengingatkan kita semua agar pemerintah dan badan usaha tetap mengedepankan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pencemaran dan perusakan lingkungan yang tergelar saat ini membincangkan negara seolah alpa dengan norma hukum UUD 1945. Jutaan orang mengalami gangguan kesehatan: terkena ispa, iritasi mata, asupan oksigen yang kurang, dan paru-paru yang terancam. Korban mengalami derita kolektif yang dalam jangka panjang membahayakan NKRI berupa rendahnya kompetensi sumber daya manusia *(human development indeks)*. Kondisi ini mengancam lumpuhnya negara karena bonus demografi bermetamorfosis menjadi beban kependudukan ke depan.

Sebagai sumbangsih gagasan akademik untuk mengawal pelaksanaan pembangunan oleh pememerintah dan badan usaha, buku ini sungguh memiliki beratribut penebar nilai-nilai *green economy* sebagai keniscayaan. Renungkanlah pesan filosofis Mohandas Karamchand Gandhi, (1869-1948): *"... earth provides enough to satisfy every man's need, but not every man's greed"*. Membangun infrastruktur di negara kepulauan ini harus tetap berjiwa merawat negeri dengan kewaspadaan terhadap munculnya

degradasi ekologis. Bukankah Gandhi telah berujar penuh hikmah: sejatinya bumi dapat memenuhi seluruh kebutuhan umat manusia, tetapi tidak pernah cukup untuk "mengenyangkan" keserakahan seseorang. Selamat membaca seberkas karya yang turut menggaungkan komitmen penyelamatan lingkungan.

Surabaya, 1 September 2024

Suparto Wijoyo
Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum dan
Wakil Direktur Bidang Riset, Pengabdian Masyarakat, Digitalisasi &
Internasionalisasi Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga

Daftar Isi

Prakata v
Kata Pengantar vii
Sebuah Pengantar Buku Ini Seberkas Peneguhan Green Economy ix

Bab 1 URGENSI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) BERBASIS *GREEN ECONOMY* **1**

Permasalahan Hukum Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Berbasis *Green Economy* 1
Jalan Menuju Penemuan: Memahami melalui Metode dan Pendekatan Penelitian 11

Bab 2 KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA (KPBU) **21**

Hakikat Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 21
- Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Secara Umum 22
- Sejarah Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 35
- Asas-Asas Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 39

Klasifikasi Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) 43
Pengaturan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia 47
- Peraturan Terkait KPBU Secara Umum 48
- Peraturan Terkait Fasilitas Penyiapan Proyek 54
- Peraturan Terkait Skema Pembayaran KPBU 55
- Peraturan Terkait Dukungan Kelayakan Pemerintah 56

Peraturan Terkait Penjaminan Infrastruktur oleh Pemerintah 57
Beberapa Putusan Terkait Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) Dalam Putusan Peradilan di Indonesia 60
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XVI/2018 60
Putusan Mahkamah Agung Nomor 1660K/PDT/2021 61
Pengaturan Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) di Berbagai Negara 63
Amerika Serikat 64
Inggris 70
Republik Rakyat Tiongkok 76

Bab 3 *GREEN ECONOMY* 83

Hakikat Green Economy 83
Definisi *Green Economy* 84
Urgensi *Green Economy* 86
Prinsip-Prinsip Terkait *Green Economy* 91
Perkembangan *Green Economy* Secara Global 98
Deklarasi Rio 99
Sustainable Development Goals (SDGs) 106
United Nation Environmental Programme (UNEP) 110
Perkembangan Green Economy di Indonesia 116
Implementasi Green Economy di dalam Berbagai Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia 122
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup 122
PP Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup 124
UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan 126
UU Cipta Kerja 127
Implementasi Green Economy di dalam Berbagai
Peraturan Perundang-Undangan di Beberapa Negara 128
Amerika 129
Inggris 134
Swedia 138
Tantangan dan Hambatan Penerapan *Green Economy* 143

**Bab 4 FORMULASI KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA (KPBU) BERBASIS GREEN ECONOMY 147**

Green Economy dalam Sektor Pembangunan 147
Konsep Kerja sama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) dengan *Green Economy* 152
Urgensi Kerja Sama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) Berlandaskan *Green Economy* 163

Implementasi Kerja sama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) Berlandaskan *Green Economy* di Berbagai Negara 166
Inggris 167
Amerika Serikat 172
Jepang 177
Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)
Berlandaskan *Green Economy* dalam Konstruksi Ius Constituendum 180
Prinsip-Prinsip Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU)
Berlandaskan *Green Economy* 180
Perlindungan Hukum 186
Model Pembiayaan/Skema KPBU
Berlandaskan *Green Economy* 193
Pengawasan 200

Daftar Pustaka 205
Tentang Penulis 229

Daftar Tabel

Tabel 1. Perbedaan di antara Skema Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kbpu, dan Privatisasi 29
Tabel 2. Alasan bagi Pemerintah dan Swasta dalam melakukan KPBU 39
Tabel 3. Perbedaan Pengaturan KPBU Sebelum dan Sesudah Perpres 38/2015 50
Tabel 4. Layanan Penjaminan Risiko Yang Diberikan PT PII 59
Tabel 5. Contoh Lembaga PPP di AS 67
Tabel 6. Lembaga negara yang terlibat dengan PPP di RRT 78
Tabel 7. Matriks Prinsip *Green Economy* *92*
Tabel 8. Beberapa Pengaturan terkait *Green Economy* di AS 132
Tabel 9. Beberapa Indikator yang dapat Menjadi Dasar Penilaian Performa Badan Usaha Pelaksana dalam Menjalankan KPBU yang Berbasis *Green Economy* ... 162
Tabel 10. Beberapa program dalam operasional PPP di AS 175
Tabel 11. Urgensi Perlindungan Eksternal bagi KPBU berbasis *Green Economy* 188

Daftar Pustaka

Absori A, Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (Muhammadiyah University Press 2001)

Adebayo AA, Lulofs K dan Heldeweg MA, "Indicators, Strategies, and Rule Settings for Sustainable Public–Private Infrastructure Partnerships: From Literature Review towards Institutional Designs" (2023) 15 Sustainability (Switzerland)

Adyana N, "Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia: Kajian Ekonomi, Politik, Dan Sosial" (2023) 4 OPTIMAL Jurnal Ekonomi dan Manajemen 11.

Ahmad FS, "Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah The Impact of Trans Java Toll Road Construction on Economic Growth in Central Java" (2022) 11 Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan 1

Alim MS, Thamrin S dan Laksmono RW, "Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Sebagai Alternatif Ketahanan Energi Nasional Masa Depan" (2023) 4 JPkMN 2427

Allen C, A Guidebook to the Green Economy (2nd edn, United Nations Division for Sustainable Development 2012).

Alfian MB, "Governance dalam Pelaksanaan Fasilitas PDF" (KPBU Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tanpa Tahun) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1118-1279/umum/kajian-opini-publik/governance-dalam-pelaksanaan-fasilitas-pdf> diakses 24 Agustus 2024

Aloysius HK, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Konsep Green Economy Untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Berbasis Ekologi" (2020) 2 JBEE 2020

Anbumozhi V dkk, "Innovative Financing for Strategic Infrastructure Development" (2023) 1 Infrastructure for Inclusive Economic Development.

APM Group Ltd, "An Overview of the PPP Process Cycle: How to Prepare, Structure and Manage a PPP Contract" (PPP Introduction and Overview, Tanpa Tahun) <https://ppp-certification.com/ppp-certification-guide/10-overview-ppp-process-cycle-how-prepare-structure-and-manage-ppp-contract> diakses 9 Juli 2024

Arini SC, "Sejarah Panjang Tol Trans Jawa yang Kini Jadi Andalan saat Mudik Lebaran" (detikfinance, 2023) <https://finance.detik.com/infrastruktur/d-6694498/sejarah-panjang-tol-trans-jawa-yang-kini-jadi-andalan-saat-mudik-lebaran> diakses 3 Agustus 2024

Aronson B dan Miwa Y, "The Rapid Growth of ESG in Japan Through Public-Private Partnership" (2022) U.S.-Asia Law Institute 1.

Asian Development Bank, Public-Private Partnerships in Urbanization in the PRC (Asian Development Bank 2014) <http://www.adb.org/publications/public-private-partnerships-urbanization-peoples-republic-china-workshop-proceedings>.

---, Public–Private Partnership Monitor: Indonesia (ADB, 2021)

Aspar M, Metode Penelitian Hukum (Universitas Sembilan Belas November 2015).

Asshiddiqie J, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" (Tanpa Tahun) <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf> diakses 1 Agustus 2024.

Averchenkova A, Fankhauser S dan Finnegan JJ, "The Impact of Strategic Climate Legislation: Evidence from Expert Interviews on the UK Climate Change Act" (2020) 21 Climate Policy 251.

Axelsson H, "The Green Economy in Sweden Drivers, Challenges and Opportunities" (Lunds Universitet 2015).

Babbie E, The Basics of Social Research (Thomson Wadsworth 2008)

Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Naskah Akademik Ratifikasi Paris Agreement" (BPHN, 2016)

Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, "Tentang Kami" (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, 2024) <https://bpdlh.id/about-us#> diakses 20 Juni 2024.

Bagaskara, "Green Economy: Pengertian, Konsep, Implementasi, Dan Peran Pemerintah" (mutu international, Tanpa Tahun) <https://mutucertification.com/green-economy/#:~:text=Implementasi%20Green%20Economy%20di%20

Indonesia&text=Target%20ini%20diharapkan%20dapat%20memicu,biaya%20mencapai%2028.223%20triliun%20rupiah.> accessed June 20, 2024.

Bakhri S, Hukum Sanksi di Berbagai Praktek Peradilan (UM Jakarta Press 2020)

Bappenas, "Kebijakan LCDI Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan" (AKSARA, 2024) <https://lcdi-indonesia.id/lcdi/> diakses 20 Juni 2024.

---, PPP Book 2023 (Bappenas 2023)

---, SDGS Knowledge Hub (SDGS, 2024) <https://sdgs.bappenas.go.id> diaskes 20 Juni 2024

Bappenas, Embassy of Denmark dan United Nation Development Programme, "Ringkasan Bagi Pembuat Kebijakan: Manfaat Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Bagi Ekonomi Sirkular di Indonesia" (2021)

Barus EB dan Wijaya S, "Penerapan Pajak Karbon Di Swedia Dan Finlandia Serta Perbandingannya Dengan Indonesia" (2021) 5 Jurnal Pajak Indonesia 257

Baser V, "Effectiveness of school site decisions on land use policy in the planning process" (2020) 9 ISPRS International Journal of Geo-Information

BBC, "Mapping Carillion's biggest construction projects" (BBC, 2018) <https://www.bbc.com/news/business-42717735> diakses 23 Juni 2024.

---, "Supermarket Di Inggris Mulai Menjual Produk Tanpa Kemasan Plastik" (BBC, 2019) <https://www.tempo.co/bbc/4115/supermarket-di-inggris-mulai-menjual-produk-tanpa-kemasan-plastik> diakses 21 Juni, 2024.

Bertels S, Watt J dan Fabbro A, Getting Started on Incorporating Sustainability into Public Procurement: A GUIDE (Embedding Project, 2022)

Bielenberg A dkk, "Financing change How to mobilize private sector financing for sustainable-infrastructure" (2016) McKinsey Center for Business and Environment 68

Blended Finance Taskforce, "Better guarantees, better finance: Mobilising capital for climate through fit-for-purpose guarantees" (BFT, 2023)

Bombard K, "Lessons From the Failed Cape Wind Project: Renewable Energy Advocates Must Protect Indigenous Voices" (The Equation, 2021) <https://blog.ucsusa.org/science-blogger/lessons-from-the-failed-cape-wind-project-renewable-energy-advocates-must-protect-indigenous-voices/> diakses 21 Juni 2024

Bosch HJ dan Gupta J, "Water property rights in investor-state contracts on extractive activities, affects water governance: An empirical assessment of 80 contracts in Africa and Asia" (2022) 31 Review of European, Comparative and International Environmental Law 295

BRE, "What BREEAM In-Use Assesses: Recognising and driving environmental performance for existing Commercial and Residential assets" (BREEAM delivered by BRE, Tanpa Tahun) <https://files.bregroup.com/breeam/BREEAM-In-Use-International_What-BIU-Assesses.pdf>.

Buchanan J, "Externality" (1962) 31 Economica 371

Byiers B dkk, "Principles for public-private partnerships – towards sustainability? - Lessons from SAGCOT, healthcare in Lesotho, and Better Factories Cambodia." (Ku Leuven, 2016)

Cahyani FA, "Upaya Peningkatan Daya Dukung Lingkungan Melalui Penerapan Prinsip Sustainable Development Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2020) 2 State Law Review

Cato MS, Green Economics: An Introduction to Theory, Policy and Practice. (Earthscan 2009).

Chan J, "What is Operations and Maintenance (O&M)?" (Limble, 2024) <https://limblecmms.com/blog/operations-and-maintenance/> diakses 12 Mei 2024.

Chandra GAS, "Eksistensi Lembaga Lingkungan Hidup Internasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2022) 4 IJD.

Chapple K, Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development. (The Center for Community Innovation 2008

Chatzimikes F, "Environmental Impact Assessment in the United States" (2022) 49 Coastal planning and management 1

Chu EW dan Karr JR, "Environmental Impact, Concept and Measurement Of" [2013] Encyclopedia of Biodiversity 278

Climate Bonds Initiative, "Green Infrastructure Investment Opportunities (INDONESIA: Green Recovery)" CBI Report 2022 (CBI, 2022).

Cohen J, "Private capital, public credit and the decline of American railways, 1840-1940" (2010) 31 Journal of Transport History 42

Colverson S dan Perera O, "Sustainable Development: Is There a Role for Public–Private Partnerships?" (2011) Sustainable Development

Corbera E,"The Carbon Offsetting Dilemma" in Paladino, S. dan Fiske, S. (eds.) The Carbon Fix; Forest Carbon, Social Justice and Environmental Governance. (Routledge, 2015).

Degos JG dan Hauret CPD, "The French Canal du Midi at the 17th century: accounting gaps and financial innovations" (2011) 2 International Journal of Economics and Accounting.

Deloitte, "Prudential Regulation Authority (PRA)" (Deloitte, Tanpa Tahun) <https://www.iasplus.com/en-gb/resources/other-regulatory/pra#:~:text=The%20Prudential%20Regulation%20Authority%20(PRA,level%20of%20the%20individual%20firm> diakses 21 Juni 2024

Department for Energy Security and Net Zero, "A Contract for Difference (CfD)" (Department for Energy Secutiry and Net Zero, 2016) <https://www.gov.uk/government/collections/contracts-for-difference#:~:text=A%20Contract%20for%20Difference%20(CfD,%2C%20a%20government%2Downed%20company> diakses 21 Juni 2024

Department for Environment Food and Rural Affairs, Procuring the Future: Sustainable Procurement National Action Plan: Recommendations from the Sustainable Procurement Task Force (Department for Environment, Food and Rural Affairs 2006)

---., "UK Government Sustainable Procurement Action Plan : Incorporating the Government response to the report of the Sustainable Procurement Task Force" (Department for Environment Food and Rural Affairs, 2007)

Derby MS dan Lawder D, "Yellen: US growth needs public, private investments, China subsidies excessive" (Climate & Energy, 2024) <https://www.reuters.com/markets/us/yellen-says-public-private-investments-needed-sustain-us-growth-2024-06-13/> diakses 15 Juni 2024.

Deye A, "U.S. Infrastructure PPPs: Ready for Takeoff?" (Who We Are, 2015) <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2015/09/25/us-infrastructure-ppps-ready-for-takeoff> diakses 8 Juni 2024.

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, "Pemerintah Dukung Percepatan Penggunaan Kendaraan Listrik" (Berita Unit, 2019) <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-dukung-percepatan-penggunaan-kendaraan-listrik> diakses 21 Juni 2024

---, "Pemerintah Optimistis EBT 23% Tahun 2025 Tercapai" (Berita Unit, 2021) <https://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-ketenagalistrikan/pemerintah-optimistis-ebt-23-tahun-2025-tercapai> diakes 20 Juni 2024

Direktorat Lingkungan Hidup, Kumpulan Pemikiran Pengembangan Green Economy di Indonesia (Tahun 2010 – 2012) (Direktorat Lingkungan Hidup 2013)

Disaster-Resilient and Environmentally-Friendly City Promotion Office, "Green Infrastructure" (Green Infrastructure, Tanpa Tahun) <https://sendai-resilience.jp/en/efforts/government/human/green-infrastructure.html> diakses 20 Juli 2024.

Ditch D, "How the 2010s Became the Decade of Debt" (Commentary Debt, 2020) <https://www.heritage.org/debt/commentary/how-the-2010s-became-the-decade-debt> diakses 12 Juni 2024.

Dogaru L, "Green Economy and Green Growth—Opportunities for Sustainable Development" (2020) 16 Proceedings

Dunne D, "CCC: England Has 'Lost a Decade' in Fight to Prepare for Climate Change Impacts" (Carbon Brief, 2023) <https://www.carbonbrief.org/ccc-england-has-lost-a-decade-in-fight-to-prepare-for-climate-change-impacts/> diakses 21 Juni 2024.

Duran DC dkk, "The Components of Sustainable Development - A Possible Approach" (2015) 26 Procedia Economics and Finance.

Efendi A, Hukum Lingkungan (PT Citra Aditya Bakti 2014).

EN+ Group International PJSC, Green Growth in Japan: The Role of Alumunium in the Low-Carbon Transition (EN+ Group International PJSC, 2022)

Ellen Macarthur Foundation, "Case Studies and Examples of Circular Economy in Action" (Circular Economy Introudction, Tanpa Tahun) <https://www.ellenmacarthurfoundation.org/topics/circular-economy-introduction/examples> diakses 21 Juni 2024.

Elviandri E, "Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia" (2019) 31 Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 252

Ekawati S dkk, "Menguatkan Peran Swasta Dalam Penurunan Emisi: Apa Yang Perlu Disiapkan?" (2018) <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/MENGUATKAN%20PERAN%20SWASTA%20DALAM%20PENURUNAN%20EMISI.pdf> diakses 20 Juni 2024.

Endicott T, "Authentic Interpretation" (2020) 33 Ratio Juris

Embassy of the People's Republic of China in The Kingdom of Norway, "Building on Past Achievements to Jointly Usher in a New Era In China-France Cooperation" (2024) <http://no.china-embassy.gov.cn/eng/zgwj_1/202405/t20240507_11293719.htm> diakses 22 Juni 2024.

Ershadi M dan Goodarzi F, "Core capabilities for achieving sustainable construction project management" (2021) 28 Sustainable Production and Consumption 1396

European Environment Agency, "The Future We Want –Declaration of the UN Conference on Sustainable Development, Rio (2012)" (Environmental policy document catalogu, 2012) <https://www.eea.europa.eu/policy-documents/the-future-we-want-2013declaration> accessed June 20, 2024

Evington Echo, "City Of Leicester College – Official Opening Of The New Building – Friday 29th August 2014" (Evington Echo, 2014) <https://evingtonecho.uk/city-of-leicester-college-official-opening-of-the-new-building-friday-29th-august-2014/> diakses 15 Juli 2024.

Fajar M dan Achmad Y, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Pustaka Pelajar 2010)

Felsinger K dkk, "Public-Private Partnership Handbook Acknowledgments" (Asian Development Bank, 2008) <https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/31484/public-private-partnership.pdf> diakses 12 Agustus 2024

Florida Non-Profit Housing dkk, Construction Supervisors Handbook (Florida Non-Profit Housing 2019).

Fu C, Lu L dan Pirabi M, "Advancing green finance: a review of sustainable development" (2023) 1 Digital Economy and Sustainable Development 1

Garner BA, Black Law Dictionary (West Publishing Co Thomson Reuters 2009)

GAW, "Permasalahan Pada Tahap Persiapan Proyek KPBU Dari Perspektif Hukum" (HukumOnline, 2016) <https://www.hukumonline.com/events/baca/arsip/lt57639c3203535/permasalahan-pada-tahap-persiapan-proyek-kpbu-dari-perspektif-hukum/> diakses 11 Juni 2024

Gehring MW, "Legal Transition to Green Economy" (2016) 12 McGill International Journal of Sustainable Development Law and Policy

Gerrard MB, "Public-Private Partnerships" (2001) 38 Finance & Development

Ghaniyyu FF dan Husnita N, "Upaya Pengendalian Perubahan Iklim Melalui Pembatasan Kendaraan Berbahan Bakar Minyak Di Indonesia Berdasarkan Paris Agreement " (2021) 7 Morality

Global Commission on the Economy and Climate, "The New Climate Economy Report: Better Growth, Better Climate" GCEC Report (GCEC, 2014).

Green Climate Fund, "United Nations Environment Programme" (Partner, 2024) <https://www.greenclimate.fund/ae/unep> diakses 20 Juni 2024.

Green Economy Tracker, "National Green Economy Plan" (Green Economy Tracker, Tanpa Tahun) <https://greeneconomytracker.org/policies/national-green-economy-plan> diakses 21 Juni 2024

---, "Sweden" (Green Economy Tracker) <https://greeneconomytracker.org/country/sweden> diakses 21 Juni 2024.

---, "USA" (Green Economy Tracker, 2024) <https://greeneconomytracker.org/country/usa> diakses 21 Juni 2024.

Government Pension Investment Fund, "ESG Report 2022: For All Generations" (GPIF, 2020)

Gouvea R, Kassicieh S dan Montoya MJR, "Using the quadruple helix to design strategies for the green economy" (2013) 80 Technological Forecasting and Social Change

Hadiyono V, "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tatangannya" (2020) 1 Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan 23

Hadjon PM, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Gadjah Mada university Press 2008)

Hakim DA, "Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2016) 9 Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum.

Hall P, "A historical Overview of Philanthropy, Voluntary Associations, and Nonprofit Organizations in the United States, 1600–2000," The Non-Profit Sector: A Research Handbook - Second Edition. Ed. (Yale University Press 2006).

Hanley N, Shogren J dan White B, Introduction to Environmental Economics (Oxford University Press 2019).

Harahap Y, Segi-Segi Hukum Perjanjian (Alumni 1986)

Hasim A, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam Uud Tahun 1945 " (2023) 3 At-Tanwir Law Review

Hernoko AY, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial (Kencana 2014).

Heshmati A, "An Empirical Survey of the Ramifications of a Green Economy" (2018) 12 International Journal of Green Economics 53

Hegazy IR dan Tohlob AA, "Strategic Environmental Assessment and SDG Integration: Enhancing Sustainable Development in Egypt" [2024] Journal of Umm Al-Qura University for Engineering and Architecture

Hidayat A, "Implementasi Pembangunan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat" (2022) 5 Papatung 55

HM Goverment, "The UK Government Sustainable Development Strategy" (HM Government, 2005) <http://www.sustainable-development.gov.uk/publications/pdf/strategy/SecFut_complete.pdf> diakses 11 Juli 2024.

HM Treasury, "A new approach to public private partnerships" (HM Treasury, 2012) <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/205112/pf2_infrastructure_new_approach_to_public_private_parnerships_051212.pdf> diakses 11 Juni 2024

---, "Standardisation of PF2 Contracts (Draft)" (HM Treasury, 2012)

HM Revenue & Customs, "HMRC internal manual: International Manual" (HM Revennue & Customs, 2016) <https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm517070> diakses 10 Juni 2024.

Hodges J, "Three Ways to Embed Sustainability in Public-Private Partnerships for U.S. Infrastructure" (BSR, 2017) <https://www.bsr.org/en/blog/embed-sustainability-in-public-private-partnerships-for-us-infrastructure> diakses 12 Juli 2024

House of Commons Education and Skills Committee, "Sustainable Schools: Are we building schools for the future?" Seventh Report of Session 2006-07 (The Stationery Office Limited, 2006).

HR R, Hukum administrasi negara (13 edn, Rajawali Pers 2018)

Hueskes M, Verhoest K dan Block T, "Governing public–private partnerships for sustainability: An analysis of procurement and governance practices of PPP infrastructure projects" (2017) 35 International Journal of Project Management 1184

Huda M, Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar (Pustaka Pelajar 2009)

Humas EBTKE, "PLTB Sidrap: Proyek Energi Untuk Masyarakat, Pemerintah dan Investor" (2019) <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/09/02/2326/pltb.sidrap.proyek.energi.untuk.masyarakat. pemerintah.dan.investor> diakses 28 Juli 2024.

Husgafvel R dan Sakaguchi D, "Circular Economy Development in the Construction Sector in Japan" (2021) 3 World 1

Indonesia Investments, "Local Governments and Private Sector should Join Hands to develop Infrastructure" (News Column, 2013) <https://www.indonesia-investments.com/news/news-columns/yudhoyono-local-governments-and-private-sector-join-hands-to-develop-infrastructure/item550?> diakses 10 Juni 2024

Infrastructure and Project Authority dan HM Treasury, "Collection: PFI Centre of Excellence" (UK Economic Growth, 2017) <https://www.gov.uk/government/collections/public-private-partnerships> diakses 20 Juni 2024.

Insani K, "Peran United Nation Environment Programme (UNEP) Sebagai Lembaga Lingkungan Hidup Internasional Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2023) 6 UNES Law Review

International Capital Market Association, "Green Bond Principles Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds June 2021" (2022) 2021 International Capital Market Association

International Court of Justice," Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons" (ICJ, Tanpa Tahun) < https://www.icj-cij.org/case/95> diakses 20 Juni 2024.

International Finance Corporation, Building Green: Sustainable Construction in Emerging Markets (International Finance Corporation, 2023).

---, Public-Private Partnership Stories (International Finance Corporation, 2019)

International Labour Organization, How to Work in the Green Economy? (1st edn, International Labour Organization 2022).

Institute for Essential Service Reform, "RAN GRK : Rencana, Implementasi Dan Sistem MRV Untuk Mencapai Penurunan Emisi GRK 26% (Atau 41%) Pada

2020" (Institute for Essential Service Reform, 2011) <https://iesr.or.id/ran-grk-rencana-implementasi-dan-sistem-mrv-untuk-mencapai-penurunan-emisi-grk-26-atau-41-pada-2020#:~:text=RAN%20GRK%20kemudian%20ditandatangani-%20oleh%20Presiden%20pada%20tanggal%2020%20September%202011%20lalu> diakses 20 Juni 2024.

Ircham M, "Kementerian PUPR Dorong Penggunaan Material Semen Ramah Lingkungan" (ASI, 2023) <https://asi.or.id/cdkementerian-pupr-dorong-penggunaan-material-semen-ramah-lingkungan/> diakses 16 Juli 2024

Isnaeni M, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (Media Surabaya 2016).

Japan National Tourism Organization, "Sustainable Japan: Pioneering destinations with global appeal" (2024) Japan. Meetings & Events.

Jumiati A dan Dahlia, "Penyelesaian Pencemaran Lingkungan Hidup Melalui Pendekatan Budaya Hukum Dan Hubungan Kemitraan " (2010) 10 Wacana

Jusron D, "Global Infrastructure Hub (GIH) dan Penyediaan Infrastruktur" (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1160-1476/umum/kajian-opini-publik/global-infrastructure-hub-gih-dan-penyediaan-infrastruktur> diakses 31 Juli 2024

Kadarukmi EMR, "Carbon Tax And Its Effect On The Economy, Taxes And Environment" (2023) 6 Awang Long Law Review 237

Kahan D dan International Maize, "Market-oriented agricultural infrastructure: appraisal of public-private partnerships" (Agriculture Management Marketing and Finance Occasional Paper, 2014).

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pembangunan" <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembangunan> diakses 4 Juli 2024.

Kansil CST, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Balai Pustaka 1989).

Katz SM, Guide to Modernizing Administration for National Development (University of Pittsburgh 1966).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Dukungan Kelayakan" (KPBU Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tanpa Tahun) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1098-1261/pjpk/dukungan-pemerintah/dukungan-kelayakan> diakses 15 Juni 2024

---,"Dukungan Pemerintah untuk KPBU" (KPBU Kementerian Keuangan Republik Indonesia) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/19-16/pjpk/pelaksanaan-kpbu/dukungan-pemerintah-untuk-kpbu> diakses 20 Mei 2024.

---, "Hubungan antar Komponen dalam Studi Penyiapan Proyek KPBU" (KPBU Kementerian Keuangan Republik Indonesia) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/76-223/umum/kajian-opini-publik/hubungan-antar-komponen-dalam-

studi-penyiapan-proyek-kpbu> diakses 22 Juni 2024.

---, "Mewaspadai Risiko Fiskal Dari Perjanjian KPBU" <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/74-221/umum/kajian-opini-publik/mewaspadai-risiko-fiskal-dari-perjanjian-kpbu#:~:text=Perjanjian KPBU menjabarkan kewajiban masing,umum disebut sebagai risiko politik.> diakses 17 Juli 2024.

---, "Peran PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) Dalam Meminimalisasi Risiko Fiskal atas Kewajiban Kontinjensi Pemerintah Indonesia yang Timbul dari Proyek Infrastruktur" (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11077/Peran-PT-Penjaminan-Infrastruktur-Indonesia-Persero-Dalam-Meminimalisasi-Risiko-Fiskal-atas-Kewajiban-Kontinjensi-Pemerintah-Indonesia-yang-Timbul-dari-Proyek-Infrastruktur.html> diakses 24 Juni 2024.

---, "Rel Hijau Menggali Peluang Green Financing dan KPBBU Dalam Perkeretaapian" (Kajian Opini Publiik, 2023) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1208-1670/umum/kajian-opini-publik/rel-hijau-menggali-peluang-green-financing-dan-kpbu-dalam-perkeretaapian> diakses 13 Juli 2024.

---,"Skema KPBU" (KPBU Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tanpa Tahun) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/34-23/pjpk/skema-kpbu> diakses 10 Mei 2024.

---, "Transaksi Proyek KPBU Tahap Penentu Keberhasilan Skema KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur" (Kajian Opini Publik) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1204-1658/umum/kajian-opini-publik/transaksi-proyek-kpbu-tahap-penentu-keberhasilan-skema-kpbu-dalam-penyediaan-infrastruktur> diakses 12 Juli 2024.

Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi "Pemerintah Tegaskan Komitmen Pengembangan Ekosistem Kendaraan Listrik" (2023) <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5327/pemerintah-tegaskan-komitmen-pengembangan-ekosistem-kendaraan-listrik> diakses 21 Juni 2024.

Kementerian Sekretariat Negara, "Buka Musrenbangnas 2024, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Sinkronisasi Program Pembangunan" (Setneg, 2024) <https://www.setneg.go.id/baca/index/buka_musrenbangnas_2024_presiden_jokowi_tekankan_pentingnya_sinkronisasi_program_pembangunan> diakses 2 Agustus 2024.

---, "Green Infrastructure dan Green Economy Membangun Masa Depan Berkelanjutan di Indonesia" (Setneg, 2024) <https://www.setneg.go.id/baca/index/green_infrastructure_dan_green_economy_membangun_masa_depan_berkelanjutan_di_indonesia> diakses 12 Juli 2024

Kennedy C dan Corfee-Morlot J, "Mobilising investment in low carbon, climate resilient infrastructure", OECD Environment Working Papers, No. 46 (OECD, 2012).

Kingo L, "The UN Global Compact: Finding Solutions to Global Challenges" (UN Chronicle, 2019) <https://www.un.org/en/un-chronicle/un-global-compact-finding-solutions-global-challenges> diakses 18 Juli 2024

Klein M, So J, dan Sbin B, "Transaction Costs in Private Infrastructure Projects—Are They Too High?" (Private Sector, 1996) < https://documents1.worldbank.org/curated/pt/504361468780292973/pdf/16884-Replacement-file-095KLEIN.pdf> diakses 10 Oktober 2024

Kline B, First Along the River: A Brief History of the U.S. Environmental Movement (5th edn, ◎Rowman & Littlefield Publishers 2022

Kumar P, "Environmental Taxes and Green Economy: An Overview" (2016) 28 Journal of Environmental Law 45

Latifah E, "Aplikasi Green Economy Dalam Koperasi Syariah: Studi Kasus Kspps Bmt Bina Ummat Sejahtera Lamongan" (2023) 3 Taraadin

Lee M dkk, "Deriving Macroeconomic Benefits From Public – Private Partnerships In Developing Asia" (ADB Economics Working Paper Series No. 551, 2018)

Leib E, "Local Environmental Law" (2008) 60 Stanford Law Review 1713

Leiringer R, "Technological innovation in PPPs: Incentives, opportunities and actions" (2006) 24 Construction Management and Economics 301

Lipscomb A, "Memos Regarding 'Signing Kyoto Protocol' and 'Climate Change COP-6 Negotiations Issues,' Sent to President Bill Clinton, November 2000" (Harvard Kennedy School, 2022) <https://policymemos.hks.harvard.edu/blog/memos-kyoto-protocol-and-cop-6-president-clinton> diakses 21 Juni 2024.

Leung E dan Cheong W, "Public-Private Partnership For Clean Air Industry Overview" (China Gas, 2013).

Levaschova OV dan Morgacheva NV, "Environmental Supervision (Control) in the area of new technology appliance" (2020) 421 IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 4.

Lister J, "The History of Privatisation part 4: The early days of PFI" (The Lowdown, 2021) <https://lowdownnhs.info/analysis/the-history-of-privatisation-part-4-the-early-days-of-pfi/> diakses 12 Juni 2024.

Löfsjögård M, "Concrete Industry" (Fossilfritt Sverige, 2019) <https://fossilfrittsverige.se/en/roadmap/the-concrete-industry/> diakses 21 Juni 2024

Loganathan K dkk, "Evaluation of Public Private Partnership in Infrastructure Projects," (ASCE Pipelines 2021)

LORMAN, "A Brief History of Public Private Partnerships" (Public Works Article, 2018) <https://www.lorman.com/resources/a-brief-history-of-public-private-partnerships-16968> diakses 10 Juni 2024

Lowe D, "A two edged sword: Integrating sustainable construction into PFI projects." Conference: Proceedings of the 4th International Postgraduate Research Conference (University of Salford, 2004)

Lukmadi FK dan Sitabuana TH, "COP26: Peran Indonesia Dalam Dinamika Climate Action Terhadap Poros Penanggulangan Perubahan Iklim Di Indonesia," Seri Seminar Nasional ke-IV Universitas Tarumanegara Tahun 2022 (2022)

Lumbanraja PC dan Lumbanraja PL, "Analisis Variabel Ekonomi Hijau (Green Economy Variable) Terhadap Pendapatan Indonesia (Tahun 2011-2020) Dengan Metode SEM-PLS" (2023) 7 Cendekia Niaga 61.

Mahi AK, Perencanaan Pembangunan Waterfront City (Kencana Prenada Media 2022)

Manullang S dan Suyatno, "Aspek Hukum Investasi Infrastruktur : Kemitraan Publik-Privat Dan Kerangka Regulasi Legal Aspects of Infrastructure Investment: Public-Private Partnership and Regulatory Framework" (2024) JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara 1185 <https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

Maplesden R, "UNIDO Green Industry: Policies for supporting Green Industry" (UNIDO, 2011)

Martínez-Alier J (ed), Recent Developments in Ecological Economics (Edward Elgar Publishing 2008)

Marković LM dan Marković L, "Legal Regulations Defining the Role and Tasks of Expert Supervision During Construction Works" (2023) 11 Agg+ 98

Maryland Department Of The Environment, "Technical Support Document For Proposed Comar 26.09 Chapter 04 Auctions Co2 Budget Trading Program" (MDTE, 2008) <https://mde.maryland.gov/programs/Air/ClimateChange/RGGI/Documents/CO2Auction_TSD_Apr2008.pdf> diakses 21 Juni 2024.

Marzuki PM, Penelitian Hukum (Kencana 2011)

---, Pengantar Ilmu Hukum (10 edn, Kencana 2017)

---, Teori Hukum (Kencana 2020)

Masruroh N dkk, Ekonomi Sirkular Dan Pembangunan Berkelanjutan (M Zidny Nafi' Hasbi ed, Jejak Pustaka 2022).

Masters N, Sustainable use of new and recycled materials in coastal and fluvial construction: A guidance manual (Thomas Telford Publishing 2001)

Maw P, Roads to Power: Britain Invents the Infrastructure State (Harvard University Press 2012).

Medianti BS, "Mewujudkan Infrastruktur Berkelanjutan: Aspek, Pembiayaan, dan Manfaat" (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1134-1302/umum/kajian-opini-publik/mewujudkan-infrastruktur-berkelanjutan-aspek-pembiayaan-dan-manfaat> diakses 2 Agustus 2024

Miri SM dan Shahrokh ZD, "A Short Introduction to Comparative Research A Short Introduction to Comparative Research Philosophy of Science and Research Method." (Allameh Tabataba'i University, 2019)

Mizrak KC, "Crisis Management and Risk Mitigation," in Filiz Mirzak, Trends, Challenges, and Practices in Contemporary Strategic Management (Premier Reference Source 2024)

Mjakuškina S, Kavosa M dan Lapina I, "Achieving sustainability in the construction supervision process" (2019) 5 Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity.

Mor F, "Carillion collapse: what went wrong?" (Insight, 2018) <https://commonslibrary.parliament.uk/carillion-collapse-what-went-wrong/> diakses 23 Juni 2024.

Mu R, de Jong M dan Koppenjan J, "The rise and fall of Public–Private Partnerships in China: a path-dependent approach" (2011) 19 Journal of Transport Geography

Mubarok D, "Penerapan Green Economy Dalam Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan" (2023) 6 Bina Ummat

Mukhlish, "Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan" (2010) 7 Jurnal Konstitusi

Mulyono R, "Peran APBN Sebagai Penggerak Utama Dalam Mewujudkan Infrastruktur Hijau Green dand Resilient" (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Tanpa Tahun) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1120-1281/umum/kajian-opini-publik/peran-apbn-sebagai-penggerak-utama-dalam-mewujudkan-infrastruktur-hijau-green-dan-resilient> diakses 15 Juli 2024

Nasereddin M dan Price A, "Addressing the capital cost barrier to sustainable construction" (2021) 7 Developments in the Built Environment 100049

National Audit Office, "The Government's Resources and Waste Reforms for England" (Department for Environment, Food & Rural Affairs, 2023).

Neal L, The Rise of Financial Capitalism (Cambridge University Press 1990)

Nexis L,"Infrastructure definition" (Legal Glossary, 2024) <https://www.lexisnexis.co.uk/legal/glossary/infrastructure> diakses 22 Juli 2024

Noho MDH dan Lumbanraja AD, "Perlindungan Hukum Public Private Partnership (PPP) Melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Independen Di Indonesia" (2023) 05 Jurnal Crepido 146

Noor MMH, "Mengenal Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Skema Public Private Partnership (PPP) di Indonesia" (Artikel DJKN, 2016) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11824/Mengenal-Kerja Sama-Pemerintah-dengan-Badan-Usaha-KPBU-Skema-Public-Private-Partnership-PPP-di-Indonesia.html> diakses 12 Juni 2024

Nurmayani, Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar) (Univerrsitas Lampung 2000).

OECD, "Green Infrastructure in the Decade for Delivery" (OECD, 2020) <https://www.oecd.org/en/publications/2020/10/green-infrastructure-in-the-decade-for-delivery_77c8475c.html>

---, "Policy Recommendations and Actions for a Circular Economy in Umeå, Sweden" (The Circular Economy in Umeå, Sweden, 2020) <https://www.oecd-ilibrary.org/earch?value1=Policy+recommendations+and+actions+for+a+circular+economy+in+Umeå%2C+Sweden&option1=quicksearch&facetOptions=51&facetNames=pub_igoId_facet&operator51=AND&option51=pub_igoId_facet&value51=%27igo%2Foecd%27&publisherId=%2Fcontent%2Figo%2Foecd&searchType=quick> diakses 21 Juni 2024

---, "Public Governance of Public-Private Partnerships" (OECD, 2012) <http://www.oecd.org/governance/budgeting/PPP-Recommendation.pdf> diakses 10 Agustus 2024

OCBC Bank, "OCBC Bank Partners Shwe Taung Group On Myanmar's First Green Loan" (OCBC, 2020

Oluwadipe S dkk, "A Critical Review of Household Recycling Barriers in the United Kingdom" (2022) 40 Waste Manag Res 905

Oshani Perera dkk, "The Role of Public Procurement in Deploying Sustainable Infrastructure" (International Institute for Sustainable Development, 2016)

Padjen IL, "Systematic Interpretation and the Re-systematization of Law: The Problem, Co-requisites, a Solution, Use" (2020) 33 International Journal for the Semiotics of Law 189

Park H and Kim JD, "Transition towards Green Banking: Role of Financial Regulators and Financial Institutions" (2020) 5 AJSSR

Parker J, The Value of BREEAM: A BSRIA Report (BSRIA, 2012) <https://tools.breeam.com/filelibrary/BREEAM%20and%20Value/The_Value_of_BREEAM.pdf> diakses 16 Agustus 2024

Partnerships for Schools, an introduction to Building Schools for the Future (4ps 2008).

Paterson F, "A Strategic Evaluation of the Knowledge Partnership Between Leicester City Council and De Montfort University Supporting the Leicester Building

Schools for the Future Programme" (Accelerate the Shift, Tanpa Tahun) <https://www.dmu.ac.uk/documents/research-documents/technology/iesd/kp-evaluation-final.pdf> diakses 21 Juli 2024

PDPPI, DJPPR dan Kementerian Keuangan, "Panduan Analisis Kelayakan Ekonomi" (Guideline, 2018) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/backend/Upload/guideline/GUIDELINE21060413315367.pdf> diakses 10 Juni 2024.

Pearce JA dan Zahra SA, "Board Composition From A Strategic Contingency Perspective" (1992) 29 Journal of Management Studies 411

Perdana R, "Success Fee Mechanism dalam KPBU Indonesia" (HukumOnline, 2024) <https://www.hukumonline.com/berita/a/success-fee-mechanism-dalam-kpbu-indonesia-lt659ca17a40d79/> diakses 10 Juni 2024

Perdana RA and Aprilia IS, "Aspek Pembangunan Berkelanjutan Dalam Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia " (2023) 6 Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni 566

Permatasari D, "PLTB, Alternatif Energi Terbarukan Di Sulawesi Selatan" (Kementerian Keuangan, 2020) <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13477/PLTB-Alternatif-Energi-terbarukan-di-Sulawesi-Selatan.html> diakses 20 Juni 2024.

Pertiwi N, Implementasi Sustainable Development di Indonesia (Pustaka Ramadhan 2021)

Perwitasari SW, "Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan: Pendekatan Inovatif Pembiayaan di Indonesia" (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023) <https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/1210-1711/umum/kajian-opini-publik/pembangunan-infrastruktur-berkelanjutan-pendekatan-inovatif-pembiayaan-di-indonesia> diakses 31 Juli 2024

Pollin R, Greening the Global Economy (MIT Press 2015).

PPIAF, "Advantages of PPP" (PPIAF, 2009)

---, "External Resource: The National Council for Public-Private Partnerships in the United States" (PPIAF, 2017) <https://www.ppiaf.org/documents/5411#:~:text=The National Council for Public-Private Partnerships (NCPPP) is,issue papers and upcoming events.> diakses 11 Juni 2024

---, "PPP Basics and Principles of a PPP Framework" (PPIAF, 2012)

PPPRLC, "How PPPs Are Used: Sectors and Services" (About PPPRLC and PPPs, 2022) <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/how-ppps-are-used-sectors-and-services> diakses 14 Agustus 2024

---,"PPP Basics: What and Why" (About PPPRLC and PPPs, Tanpa Tahun) <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/PPP_Online_Reference_Guide/PPP_Basics> diakses 2 Juni 2024

---,"PPP Contract Types and Terminology" (About PPPRLC and PPPs, Tanpa Tahun) <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/ppp-contract-types-and-terminology> diakses 2 Juni 2024

---, "PPP Unit China" (PPP Unit, 2021) <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-unit-china> diakses 23 Juni 2024.

---, "PPP Unit United States of America" (PPP Unit, 2022) <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/library/ppp-unit-united-states-america> diakses 10 Juni 2024

---,"What are PPPs?" (About PPPRLC and PPPs, Tanpa Tahun) <https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/about-us/about-public-private-partnerships> diakses 20 Mei 2024

PT Penjaminan Infrastruktur Persero, Acuan Alokasi Risiko: Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) di Indonesia (PT Penjaminan Infrastruktur Persero 2020).

Pumfrey I, "PF2 - One year on" (LocalGov, 2014) <https://www.localgov.co.uk/PF2---One-year-on/35634> diakses 19 Juni 2024

Purnomo A dkk, "A Scientometric Mapping of Green Economy Academic Publication" (2021) Proceedings of the 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management

Rachmawati, "Tolak PLTU Indramayu Warga Bentuk Jatayu dan Berjuang Hingga Ke Jepang" (Kompas, 2020) <https://regional.kompas.com/read/2020/06/08/08380091/tolak-pltu-indramayu-warga-bentuk-jatayu-dan-berjuang-hingga-ke-jepang-2?page=all#google_vignette> diakses 29 Juli 2024.

Raghutla C dam Kolati Y, "Public-Private Partnerships Investment in Energy as New Determinant of Renewable Energy: The Role of Political Cooperation in China and India" (2023) 10 Energy Reports 3092

Rahardjo S, Ilmu Hukum (Citra Aditya Bakti 1996)

Rahmah M, Hukum Investasi (Kencana 2020)

Ridwan dan Nawir IS, Buku Ekonomi Publik (Pustaka Pelajar 2021)

Ryan B, "Public private partnerships and sustainability principles guiding legislation and current practice" Tudublin January Report (Technological Unitersuty Dublin, 2004)

Schools Extranet, "Lower Carbon Lunches" (Sustainable Schools, Tanpa Tahun) <https://schools.leicester.gov.uk/services/environment-health-and-well-being/sustainable-schools/previous-projects/lower-carbon-lunches/> diakses 8 Juli 2024.

Science Based Targets, "AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION" (Science Based Targets, Tanpa Tahun) <https://sciencebasedtargets.org/> diakses 21 Juni, 2024

Scholten P, Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlandsch Burgerlijk Recht: Algemeen deel (Zwolle: Tjeenk Willink 1931)

Sellang K, Administrasi dan Pelayanan Publik: Antara Teori dan Aplikasinya (Penerbit Ombak 2016).

Semyonovykh AE, "Legal Protection and Legal Defense: Approaches to the Study of Concepts" (2022) 134 SHS Web of Conferences 00122

Siahaan VR, Politik Lingkungan Indonesia: Teori dan Studi Kasus (UKI Press 2020)

Simamora YS, Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia (LaksBang PRESSindo 2009).

Sodikin, "Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan" (HukumOnline, 2010) <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb4950701fb73000e1c710c/penegakan-hukum-lingkungan-menurut-undang-undang-nomor-32-tahun-2009-tentang-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan/> diakses 21 Juni 2024.

Sofia E, "Implikasi Hukum Paris Agreement Melalui Program REDD+ Berbasis Blue Carbon Di Indonesia" (2019) 8 Jurnal Magister Hukum Udayana.

Stallard E, "Wind Is Main Source of UK Electricity for First Time" (BBC News, 2023) <https://www.bbc.com/news/science-environment-65557469> diakses 21 Juni 2024.

Stavins RN, "Experience with Market-Based Environmental Policy Instruments" (1996) 81 Economic Review 1.

Stigson B, "Paper on Partnerships involving the Private Secto" Conference of EECCA Environment Ministers and their partner (OECD, 2004)

Subandi AY, "A Brief History Of Sustainable Development Principles And Its Implementation In International Law And Indonesian Law" (2022) 17 Pranata Hukum

Subekti, Hukum Perjanjian (Intermasa 2005).

Sugiarto EC, "Tol Trans Jawa dan Pertumbuhan Ekonomi Regional" (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2018) <https://www.setneg.go.id/baca/index/tol_trans_jawa_dan_pertumbuhan_ekonomi_regional> diakses 30 Juli 2024.

Suharto E, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara: Pelajaran apa yang bisa dipetik untuk membangun Indonesia?," Mengkaji Ulang Relevansi Welfare

State dan Terobosan melalui Desentralisasi Otonomi di Indonesia (Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta dan Perkumpulan Prakarsa Jakarta 2006)

Sukiati, Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar (Manhaji 2016)

Sulistyowati dkk, Kompendium Rekomendasi Kebijakan Infrastruktur: Kajian Berbasis Studi Kasus Indonesi Infrastructure Roundtable (IIR) 1-12 (3 edn, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (Persero) 2024).

Susilo J, "BRG: Biaya Restorasi Gambut Rp12 Juta per Hektar" (Warta, 2016) <https://www.antaranews.com/berita/552739/brg-biaya-restorasi-gambut-rp12-juta-per-hektar> accessed June 20, 2024.

Sweden Sverige, "Lowering Emissions Is Key to Saving the Climate. Find out How Sweden Does It." (Sweden and sustainability, Tanpa Tahun) <https://sweden.se/climate/sustainability/sweden-and-sustainability> diakses 21 Juni 2024.

Swedish Environmental Protection Agency, "Towards a Better Environment" (Swedish Environmental Protection Agency, Tanpa Tahun) <https://www.naturvardsverket.se/en/> accessed June 21, 2024.

Switchasia, "Green Finance" (Switchasia, 2022)

Thani S, "Peranan Hukum Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" (2017) Jurnal Warta.

The Hamilton Project, "Public-Private Partnerships to Revamp U.S. Infrastructure" (Hamilton Project Feb Edition, 2011).

The State Council The People's Republic of China, "China to regulate, implement new PPP mechanism" (The State Council The PRC, 2023) <https://english.www.gov.cn/policies/latestreleases/202311/08/content_WS654b62e9c6d0868f4e8e114c.html> diakses 23 Juni 2024.

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, "Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dengan Mekanisme Pembayaran Ketersediaan (Availability Payment)" (2020) 5 Laporan Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Tostar A, "The three US green building legislation trends you need to know about" (Commercial Property Executive, 2021) <https://www.commercialsearch.com/news/the-3-u-s-green-building-legislation-trends-you-need-to-know/> diakses 10 Juli 2024

Trew A, "Infrastructure Finance and Industrial Takeoff in England" (2017) 42 Journal of Money, Credit and Banking 985.

Üç M dan Elitaş C, "Life Cycle Costing for Sustainability" in Information Resources Management Association « Waste management : concepts, methodologies, tools, and applications» (IGI Global, 2020)

UK Parliment, "Memorandum submitted by the Department for Education and Skills (DfES)" (Education and Skills Commission, 2006) <https://publications.parliament.uk/pa/cm200607/cmselect/cmeduski/140/6120602.htm> diakses 11 Juli 2024.

UKTI, UK Department of Health dan NHS, "Public Private Partnerships — innovative approaches to extend healthcare services" (Healthcare Is Great, 2013) 7 <https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/266818/07_PPP_28.11.13.pdf> diakses 10 Juni 2024.

UNESCAP, Public-Private Partnership Projects in Infrastructure (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 2011).

United Kingdom National Audit Office, "PFI and PF2" (UK NAO, 2018).

United Nations, "Governance in Public Private Partnerships for Infrastructure Development" (United Nations, 2004)

---,"The Future We Want" (United Nations, Tanpa Tahun) <https://www.un.org/disabilities/documents/rio20_outcome_document_complete.pdf> diakses 20 Juni 2024

---,"Outcome of the June 2012 Conference "The Future We Want" (UNCSD, 2012) <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/13662/N1238164.pdf?sequence=1&amp%3BisAllowed=> diakses 20 Juni 2024.

---,"Why Is UNEA Important?" (Climate and Environment, 2024) <https://news.un.org/en/story/2024/02/1146932> diakses 20 Juni 2024

United Nations Climate Change, "The Paris Agreement" (Process and Meetings, Tanpa Tahun) <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement> diakses 20 Juni 2024.

---,"Nationally Determined Contributions (NDCs)" (United Nations Climate Change, 2022) <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs> diakses 21 Juni 2024

United Nations Environmental Programme, "Global Green Economy Index Is Out and Sweden Tops the List" (Green Economy, 2016) <https://www.unep.org/news-and-stories/news/global-green-economy-index-out-and-sweden-tops-list-0> diakses 21 Juni 2024

---, Global Green New Deal: Policy Brief (UNEP, 2009)

---,"Integrated Approaches to Sustainable Infrastructure" (UNEP Webinar, 2021) < https://www.unep.org/events/webinar/integrated-approaches-sustainable-infrastructure-investment> diakses 2 Agustus 2024

---, "Sweden Commits to Reduction of Plastic Pollution by Adopting a National Plastic Action Plan with Goals and Concrete Actions" (United Nations, Tanpa Tahun)

<https://sdgs.un.org/partnerships/sweden-commits-reduction-plastic-pollution-adopting-national-plastic-action-plan-goals> diakses 21 Juni 2024

---,"Sustainable Infrastructure Investment" (Green Economy, 2024) <https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/sustainable-infrastructure-investment> diakses 10 Juli 2024.

---, Trade and Green Economy: A Handbook (UNEP 2014)

---,"United Nations Environment Programme (UNEP)" (UNEP, Tanpa Tahun) <https://sdgs.un.org/un-system-sdg-implementation/united-nations-environment-programme-unep-24515> diakses 20 Juni 2024.

---,"UNEP Programme Performance Report 2013" (UNEP, 2013) <https://www.unep.org/resources/report/unep-programme-performance-report-2013> diakses 20 Juni 2024.

---,"UNEP, International Environmental Governance, and the 2030 Sustainable Development Agenda" (UNEP, Tanpa Tahun) <https://www.unep.org/resources/publication/unep-international-environmental-governance-and-2030-sustainable-development> diakses 20 Juni 2024

United States Congress, "S.874 - Build Green Infrastructure and Jobs Act" (Legislation, 2021) <https://www.congress.gov/bill/117th-congress/senate-bill/874> diakses 10 Juli 2024

United States Department of State, "The Climate Crisis: Working Together for Future Generations" (Climate Crisis, Tanpa Tahun) <https://www.state.gov/policy-issues/climate-crisis/#:~:text=The%20United%20States'%20Sustainability%20Plan,emissions%20by%202050%2C%20and%20more.> diakses 21 Juni, 2024.

United States Department Of Transportation, "Building Great Transportation Infrastructure: Toolkit on how to plan, fund, deliver, and maintain a transportation system" Momentum April Edition (USDOT, 2022)

United States Environmental Protection Agency, "Laws & Regulations" (United States Environmental Protection Agency, Tanpa Tahun) <https://www.epa.gov/laws-regulations> diakses 21 Juni 2024.

---, "WasteWise" (United States Environmental Protection Agency, Tanpa Tahun) <https://www.epa.gov/smm/wastewise> diakses 21 Juni 2024

Utomo P, "Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City" (2018) 1 Nurani Hukum.

Vassileva A, "Green Public-Private Partnerships (PPPs) as an Instrument for Sustainable Development" (2022) 2 Journal of World Economy: Transformations & Transitions 1

Vecchi V, Caselli S dan Corbetta G, "The Public-Private Partnerships Framework," Public Public Private Partnerships for Infrastructure and Business Development: Principles, Practices, and Perspectives (Palgrave Macmillan 2015).

Verdouw W, "Sharing Risk and Revenues from PPPs: Perspectives from current practice in the road sector," (International Institute for Sustainable Development Discussion, 2015)

Vert Energy Group, "The Benefits of LEED Certification for Green Buildings" (Green Building, Tanpa Tahun) <https://vertenergygroup.com/the-benefits-of-leed-certification-for-green-buildings/#:~:text=Environmental Benefits of LEED Certification&text=To reduce energy consumption and,of sustainable products and methods.> diakses 19 Juli 2024

Ward JR, The Finance of Canal Building in Eighteenth Century England (Oxford University Press 1974).

Warlina L, "Prinsip-prinsip Pembangunan Berwawasan Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan" (Manajemen Pembangunan dan Lingkungan, 2009) <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PWKL4409-M1.pdf> diakses 31 Juli 2024.

Weingroff RF, "Federal Aid Road Act of 1916: Building The Foundation" (1996) 60 Public Roads.

Wibisana AG, "Pembangunan Berkelanjutan: Status Hukum Dan Pemaknaannya" (2013) 43 Jurnal Hukum dan Pembangunan

Wibowo A dkk, "Panduan Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Publik" (PT PII, 2020) <https://www.ptpii.co.id/cfind/source/files/panduan-penyusunan-studi-pendahuluan-endorsement-bappenas.pdf> diakses 25 Juni 2024.

Williams B, "The Impact of Green Marketing" (The London Economic, 2023) <https://www.thelondoneconomic.com/lifestyle/my-business/the-impact-of-green-marketing-359487/> diakses 21 Juni 2024.

Wilson GER, "Charting the course for SDG financing in the decade of delivery" (Weforum, 2020) <https://www.weforum.org/agenda/2020/01/unlocking-sdg-financing-decade-delivery/> diakses 20 Juli 2024.

Winasri S, Nugraha X and Wibisono AMA, "Pembangunan Desa Mandiri Energi Melalui Bum Desa: Upaya Mencapai Clean And Affordable Energy (Developing Energy Independent Villages with Village-Owned Enterprises (BUM DESA): Ways to Achieve Clean and Affordable Energy)" (2022) 11 Rechtsvinding 2022

World Economic Forum, "Annual Report 2021|2022" (World Economic Forum, 2022).

Yang M, Vladimirova D dan Evans S, "Creating and Capturing Value Through Sustainability: The Sustainable Value Analysis ToolA new tool helps companies discover opportunities to create and capture value through sustainability." (2017) 60 Research Technology Management 30

Yaya R, "Public-Private Partnerships: an International Development vis a vis Indonesia Experience" (2014) 5 Journal of Government and Politics 209

Yescombe ER, Public–Private Partnerships: Principles of Policy and Finance (Elsevier Ltd 2007).

Yonatan, Fitriyah N dan Margono A, "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kelancaran Pelayanan Pada Masyarakat Di Kecamatan Mentarang Kabupaten Malinau Yonatan 1 , Nur Fitriyah 2 ,Antonius Margono 3" (2014) 2 538.

Yunusova S, "the Essence of Public-Private Partnership and Its Importance in the Implementation of Infrastructure Projects" (2022) 23 Economics and education 17

Zuhda MF, Dhea VI dan Sari L, "Legislasi Hijau Regional (Regional Green Legislation) Untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Sektor Energi 2030" (2022) 8 Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia 431

Tentang Penulis

Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., FCBArb.,

Lahir Surabaya, 17 Februari 1984. Saat ini merupakan dosen tetap PNS di Fakultas Hukum Universitas Airlangga sejak tahun 2006 sampai sekarang. Bidang keahliannya utamanya adalah Hukum Kontrak, Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Hukum Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, Penyelesaian Sengketa Alternatif. Selain aktif melakukan Tri dharma pendidikan, saat ini juga menduduki 3 jabatan sebagai Kepala Bidang Hukum Universitas Airlangga dan Manajer Hukum dan Organisasi Tata Laksana (Ortala) Rumah Sakit Universitas Airlangga sejak tahun 2021. Selain itu juga dalam bidang profesional hukum, sebagai pendiri sekaligus Managing Partner dari KJD Law Firm. Sejak Juli 2024, ditetapkan sebagai Arbiter terdaftar dalam daftar Arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI Arbitration Centre). Adapun riwayat pendidikannya, beliau mendapatkan gelar sarjananya (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2005 dengan minat hukum bisnis. Selanjutnya meraih gelar S2 (M.H.) di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga pada tahun 2007 dan Master of Laws (LL.M.) pada program International Business

Law and Globalisation (IBLG) di Faculty of Law Utrecht Universiteit, The Netherlands pada tahun 2011. Selama kuliah di Utrecht University, beliau mendapat beasiswa dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Pada tahun 2019, beliau menyelesaikan gelar Doktor Ilmu Hukum (Dr.) di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul Disertasi "Memperkaya Diri Secara Tidak Adil (Unjust Enrichment) sebagai Dasar Tuntutan Ganti Rugi" dan menjadi Lulusan Terbaik Program Doktor Ilmu Hukum Periode Desember 2019. Pada tahun 2021, lulus assessment mendapatkan (ACIArb) dari The Chartered Institute of Arbitrators dengan No. Reg. 803725 yang diberikan oleh The Chartered Institute of Arbitrators di tahun 2021. Selama aktif sebagai dosen, aktif melakukan penelitian, publikasi baik di jurnal nasional dan internasional serta pengabdian masyarakat. Pada organisasi ilmiah dan profesional juga aktif sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan (APHK) seluruh Indonesia dan sebagai Managing Partner di Firma Hukum KJD LAW FIRM

Beliau aktif memberikan kuliah mahasiswa S1 Ilmu Hukum, S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum, dan S2 Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Mata kuliah yang diajarkan antara lain Hukum Kontrak, Hukum Perdata, Hukum Siber dan Kenotariatan, Penyelesaian Sengketa Alternatif dan Arbitrase, Perancangan Kontrak, Hukum Perikatan, Argumentasi Hukum, Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontrak Dagang Internasional, Hukum Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, Perbandingan Kontrak, Hukum Harta Kekayaan. Selain itu ditugaskan untuk mengajar mahasiswa S2 di Program Studi Sains Hukum dan Pembangunan (MSHP) dan Program Studi Ilmu Kepolisian (KIK) Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dengan mata kuliah Transaksi Bisnis dan Perancangan Kontrak Bisnis dan Teori Moral dan Etika. 4 Selain itu juga aktif memberikan kuliah S3 di Program Studi Doktor Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dengan mata kuliah Metode Penelitian dan Teori Tanggung Gugat.

Prof. Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M.,

Lahir Surabaya, 12 September 1971, menikah dengan Ir. Zainul Arifin dan memiliki dua putri (Adin- da Balqis T.G. dan Adhisty Radhita Vasya). Setelah menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya (1994), penulis melanjutkan studi S-2 di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Airlangga (1995) dengan mendapat beasiswa Urge (Bank Dunia-DIKTI) dan lulus hingga tahun 1998. Sejak tahun 2008, penulis men- jadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada tahun 2007-2008 menempuh pendidikan studi S-2 di Monash University Melbourne Victoria, Australia dengan beasiswa dari Australian Partnership Scholarship (APS) dari pemerintah Australia hingga meraih gelar LL.M. (2008). Tahun 2009, penulis melanjutkan studi S-3 di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan lulus pada Mei 2012 sebagai lulusan terbaik. Selain menyelesaikan pendidikan formal, penulis juga telah mengikuti beberapa pelatihan di dalam dan di luar negeri di antaranya Training on Technology Licensing for ASEAN Countries di Taipeh-Taiwan yang dibiayai oleh the Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS)-Japan (2006), Japan Patent Office/Intellectual Property Rights (IPR) Training for Trainers di Tokyo yang dibiayai oleh HIDAJPO (Je- pang) pada Juni 2012 dan Juli 2015. Tahun 2016 mendapat beasiswa untuk mengikuti Colloquium for IP Teachers (tingkat dunia) yang diselenggarakan oleh WIPO/WTO di Genewa, Swiss. Tahun 2017 kembali mendapat beasiswa yang sama untuk Colloquium for IP Teachers (untuk yang tingkat Asia) di Singapura. Pada tahun 2011, penulis juga melakukan *sandwich-like program* dari DIKTI. Saat ini penulis masih aktif berprofesi sebagai staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, baik di riset selama tiga bulan di Utrecht University di Belanda dengan beasiswa Program Sarjana dan Magister (Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan) dan Program Doktor dengan spesialisasi Hukum Pasar Modal, Hukum Investasi dan Hak Kekayaan Intelektual. Di bidang pasar modal, tentang

Legal Opinion (1994) oleh Konsultan Hukum Pasar Modal dan penulis telah menekuni bidang ini sejak S-1 dengan mengambil skripsi Tesis mengenai Perlindungan Investor Terhadap Praktik Insider Trading (1997). Bahkan untuk penelitian disertasi S-3, penulis juga memfokuskan kajian yang merupakan gabungan antara bidang pasar modal dan hak kekayaan intelektual (HKI) dengan menulis mengenai sekuritasasi Hak Kekayaan Intelektual yaitu kajian tentang hak kekayaan intelektual ditransformasi menjadi sekuritas (efek). Penulis telah menulis beberapa kajian tentang hukum pasar modal di jurnal nasional. Penulis telah menulis beberapa buku, yaitu: Sekuritisasi Hak Kekayaan Intelektual (2012), Divestasi Saham untuk Investor Bidang Pertambangan (2013), Perlindungan Indikasi Geografis untuk Kerajinan Batik (2014), Hukum Pasar Modal (Prenada Media Group, 2019), Disclosure of Origin dalam Sistem Paten (2019), Perlindungan Tanaman Lokal Rumput Laut (2019), dan Public Private Partnership di Bidang Infrastruktur Kemaritiman (2019). Penulis menulis artikel di jurnal internasional yang terindeks SCOPUS (2017, 2019, dan 2020) dan Journal WTO-WIPO (2016 dan 2017). Penulis menjadi *visiting scholar/ honorary staff* di University of Newcastle, Sydney (2019) dan ANCORS University of Wollongong (2019). Penulis juga menjadi narasumber di beberapa seminar dan pemakalah di konferensi internasional seperti di Singapore, Malaysia, Genewa, Portugal, dan Madrid. Penulis aktif juga dalam organisasi profesi seperti Asosiasi Pengajar Hak Kekayaan Intelektual dan Hukum Perdata.

Angelica Milano Aryani Wibisono,

Lahir di Pasuruan, 4 September 2003. Saat ini merupakan mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2021. Memiliki ketertarikan dalam melakukan penulisan dan debat hukum, sehingga Angelica aktif dalam organisasi bidang kepenulisan dan debat hukum di kampus serta telah dipercaya sebagai delegasi universitas dalam mengikuti berbagai kompetisi debat hukum di tingkat nasional. Angelica

juga pernah memenangkan Lomba Debat APBN 2023 serta mendapat predikat sebagai Best Speaker. Dalam bidang kepenulisan, Angelica juga pernah meraih juara 2 dalam kompetisi International Scientific Paper Competition by UNISLA 2023. Hingga saat ini penulis aktif dalam mengikuti lomba dan aktivitas penulisan dan debat khususnya di bidang hukum.

Bryan Owen Soeprapto,

Lahir di Surabaya pada 14 Juni 2003, adalah seorang mahasiswa S1 Fakultas Hukum di Universitas Airlangga yang sedang menempuh peminatan dalam bidang hukum bisnis. Di tengah kesibukannya sebagai mahasiswa, Bryan aktif mengikuti berbagai kegiatan penulisan dan kompetisi, seperti debat hukum dan karya tulis ilmiah. Beberapa di antaranya adalah Debat APBN 2023 dan Dr. Mochtar Riady Law Week 2023. Prestasi ini mencerminkan dedikasi Bryan dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya di bidang hukum, khususnya dalam aspek hukum bisnis.

KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA BERBASIS GREEN ECONOMY



Airlangga University Press

ISBN 978-634-7123-05-3